

SENATOR



ISSN 2978 - 3118

ISSN 2987-3118



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 16 - 31 OKTOBER 2024

■ Nusantara

Hakim Mengadud ke DPD RI

■ Gagasan

Eksekutif Tanpa Oposisi:
Demokrasi yang Tergadai

■ Nusantara

Abcandra Muhammad Akbar
Pimpinan MPR RI dari DPD RI



SENATOR BARU SEMANGAT BARU

Penyediaan IGD Klinik Pratama
Jadi Perhatian Setjen DPD RI

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia



SENAT UTAMA

04



- Senator Baru Semangat Baru
- Anggaran Dikelola Transparan
- Perjuangkan Tambahan Anggaran ke Daerah
- Prioritaskan Isu Lokal
- Perjuangkan Kekayaan SDA Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat
- Mendorong Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja
- Perjuangkan Nasib Honorer

NUSANTARA

11

- Hakim Mengadu ke DPD RI
- Hadiri Peringatan HUT TNI Ke-79 Sultan Bangga dengan Alutsista TNI
- Bertemu Dubes Arab Saudi Sultan Bahas Penyelenggaraan Haji
- Kasus Korupsi di Daerah Karena Lemah Pengawasan
- Nono Kutuk Serangan Israel Melukai Dua Prajurit TNI
- Hilmy Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI di Lebanon
- Hakim Desak Pemerintah Hentikan Agresi Israel ke Palestina

VARIA SENAT

20

- Abcandra Muhammad Akbar Pimpinan MPR RI dari DPD RI

- Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Pimpinan Alkel Tahun 2024-2025
- RDP dengan Kemenpora
- Komite III Soroti Masalah PON XXI
- Hadapi Ancaman Krisis Pangan Perlu Program Regenerasi Petani

SEKRETARIAT JENDERAL

26

- Penyediaan IGD Klinik Pratama Jadi Perhatian Setjen DPD RI

GALERI FOTO

27



GAGASAN

28

- Eksekutif Tanpa Oposisi: Demokrasi yang Tergadai

KULINER

30

- Empat Kuliner Menggiurkan dari Sumbawa, NTB
Four Tempting Culinary Delights from Sumbawa, NTB





Milennial DPD RI dan Tantangan Aspirasi Daerah

Kehadiran para milenial baru di kursi DPD RI memberikan harapan baru dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Mereka hadir dengan semangat dan ide-ide segar yang diharapkan dapat memberikan warna baru dalam upaya DPD RI menyuarakan aspirasi daerah. Semangat ini patut diapresiasi, mengingat mereka adalah representasi dari generasi yang memahami dinamika perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi tetap besar, terutama berkaitan dengan keterbatasan wewenang DPD RI dalam menjalankan fungsi legislasi.

Keterbatasan wewenang ini menjadi titik lemah bagi DPD RI, yang sering kali membuatnya tumpul dalam menjalankan peran yang seharusnya. Walaupun milenial memiliki potensi untuk membawa perubahan, tanpa adanya dukungan yang memadai, nasib mereka mungkin akan sama dengan senator-senator sebelumnya yang kesulitan untuk memperjuangkan aspirasi daerah secara efektif. Dalam konteks ini, suara mereka bisa tereduksi jika tidak didukung oleh perubahan struktural yang memadai dalam sistem legislatif kita.

Usulan dari pakar pemerintahan Djohermansyah melahirkan UU tersendiri bagi DPD RI yang terpisah dari UU MD3, menawarkan harapan akan penguatan posisi dan fungsi DPD RI. Dengan pemisahan tersebut, DPD RI diharapkan dapat menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dengan lebih kuat, menciptakan *check and balances* yang lebih efektif dalam sistem pemerintahan. Ini bukan hanya akan memperkuat keberadaan DPD RI, tetapi juga memberikan kesempatan bagi para senator milenial untuk mengimplementasikan visi mereka dalam memperjuangkan aspirasi daerah. **(* / Pemred)**

DPD RI Millenials and Regional Aspiration Challenge

The very presence of new millennials sitting in DPD RI brings new hope in striving for regional interests at national level. They are there with courage and fresh ideas which are expected to be able to add nuances to the endeavours of DPD RI to voice out regional aspiration. The courage is worth the appreciation, considering them as the representative of a generation that understands the dynamic of the changing of ages and of the needs of the community. Nevertheless the challenges remain great, particularly which involve the limitation of DPD RI's authority in exercising its legislative functions.

This authority limitation has become the weak link to DPD RI, which frequently blunts it to exercise its supposed role. Despite the potential of millennials to bring changes, without sufficient support their fate will perhaps end up similarly to earlier senators who encountered difficulty to strive for regional aspiration effectively. In this context, their voice may be reduced unless there is a support of sufficient structural change within our legislative system.

*The recommendation from government expert, Djohermansyah, gives birth to a distinct law for DPD RI which is separated from MD3 Law, and it offers hope for strengthening the position and the function of DPD RI. With such separation, DPD RI is expected to be able to exercise its legislative and supervisory function better by creating a more effective check and balance into government system. This is not only solidifying the very existence of DPD RI but also providing opportunity platform to those millennial senators to implement their vision in striving for regional aspiration. **(* / Chief Editor)***

Senator Baru Semangat Baru

Pada tanggal 1 Oktober 2024, sebanyak 152 senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2024-2029 resmi dilantik, yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan janji. Mereka yang dilantik tersebut adalah merupakan hasil Pemilu 2024. Dari 152 yang dilantik tersebut, lebih dari separuhnya atau sekitar 55,3 persen, merupakan senator baru atau wajah baru.

Para senator baru yang juga banyak dari kalangan generasi milenial tersebut, memiliki semangat baru dalam memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah dan juga nasional. “Saya akan mewakafkan diri saya untuk perubahan DPD RI ke depan. Sebagai generasi milenial, saya akan membangun kolaborasi lintas generasi dengan memaksimalkan penguatan lembaga DPD RI,” kata Akbar, usai terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Kelompok DPD RI, Kamis (3/10/2024) dinihari.

Pada Jumat (4/10/2024), Abcandra Muhammad Akbar Supratman bersama sejumlah senator dari kalangan milenial, bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Kemenpora. Dalam pertemuan tersebut,



Abcandra Muhammad Akbar Supratman bersama sejumlah senator atau anggota DPD RI dalam kelompok milenial dengan Menpora Dito Ariotedjo. (Foto Kemenpora)

Abcandra Akbar menyampaikan keinginannya untuk berkolaborasi dengan Kemenpora dalam kegiatan di DPD RI dan MPR RI di bidang pemuda dan olah raga.

“Alhamdulillah saya bersama kawan-kawan senator muda datang menghadiri undangan dari Menpora Dito dalam rangka kolaborasi lintas generasi. Dan ke depan mudah-mudahan bisa bersinergi dalam menjalankan program kepemudaan, baik di MPR RI dan DPD RI dengan Kemenpora,” kata Abcandra Akbar.

Menpora Dito Ariotedjo menyampaikan rasa bangganya melihat banyak senator-senator muda pada periode 2024-2029. Apalagi dengan terpilihnya Abcandra Akbar, seorang senator muda berusia 26 tahun sebagai Wakil Ketua MPR RI. Menurut catatannya, Abcandra Akbar adalah Pimpinan MPR RI termuda dalam sejarah keberadaan lembaga tinggi negara tersebut.

“Alhamdulillah saya ba-

hagia melihat adik-adik kita berhasil menjadi senator muda. Seperti Mas Akbar yang masih berusia 26 tahun bisa menjadi Wakil Ketua MPR RI. Saya sebagai Menpora sangat bangga melihat pencapaian anak-anak muda yang berhasil dipilih masyarakat dari masing-masing daerah. Pasti kami kementerian yang menaungi anak-anak muda semangat dan siap menyambut kolaborasi ini,” kata Menpora Dito.

Menpora Dito juga menyatakan siap bersinergi untuk mendukung program-program yang ada di DPD RI atau MPR RI. “Kita akan antusias memberikan dukungan seperti program 4 pilar kebangsaan terhadap anak muda, dan kita juga mendorong bagaimana anak-anak muda ini bisa memberikan warna baru di MPR RI. Semoga pertemuan ini menjadi paradigma baru dan suasana baru untuk Kemenpora, DPD RI dan MPR RI,” ujarnya. (*)

Anggaran Dikelola Transparan

Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Bengkulu Elisa Ermasari, dipercaya sebagai Ketua Anggaran DPD RI Wilayah Sumatera. Sebagai Ketua Anggaran DPD RI Wilayah Sumatera, Elisa bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, memastikan bahwa semua dana dikelola sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

“Peran ini sangat strategis, mengingat anggaran yang tepat sasaran dan transparan akan menunjang efektivitas kinerja DPD RI secara keseluruhan,” kata Elisa Ermasari, Rabu (9/10/2024).

Selain itu, dia juga dipercayai menduduki kursi Wakil Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT). Sebagai salah

satu alat kelengkapan DPD RI, dia menilai PURT berperan penting dalam mengatur urusan internal terkait kesejahteraan anggota dan pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI. Selain pengelolaan anggaran, PURT juga mengawasi berbagai aspek teknis, seperti pengaturan logistik, pemeliharaan fasilitas, dan layanan pendukung lainnya yang penting untuk kelancaran operasional DPD RI.

Dengan perbaikan yang signifikan dalam manajemen internal DPD RI, ia memastikan kesejahteraan anggota dan pegawai DPD RI lebih terjamin melalui kebijakan internal yang tepat. “Tugas ini adalah amanah besar yang harus saya emban dengan penuh tanggung jawab. Kami akan bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan anggota dan pegawai. Serta memastikan anggaran dikelola dengan transparan,” ujar Elisa.

Berbeda dengan Elisa, senator sedapilnya Leni Haryati John Latief yang menempati Komite I, menyatakan siap berjuang untuk membawa berbagai aspirasi Bengkulu agar dapat diakomodir di pemerintahan pusat, terutama yang terkait urusan-urusan yang menyangkut tugasnya di Komite I.

“Insya Allah saya akan selalu berupaya memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sampai merugikan kepentingan masyarakat, terutama di

daerah-daerah. Baik yang menyangkut pemerintahan daerah, aparatur negara, hingga masalah politik, hukum dan hak asasi manusia,” kata Leni Haryati John Latief.

Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, selaku senator penting untuk mempertahankan integritas dan keberanian dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Senator harus sepenuhnya berdiri di pihak masyarakat daerah, tidak boleh patuh atau tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan pihak tertentu.

Ya akan mengawal berbagai aspirasi yang selama ini telah disampaikan masyarakat kepada Komite I DPD RI periode sebelumnya. “Misalnya mengenai usulan pemekaran daerah, pembangunan wilayah perbatasan, persoalan honorer, sengketa tapal batas, konflik pertanahan, peningkatan dana desa, dan berbagai aspirasi lainnya,” kata Leni Haryati John Latief. (*)



Elisa Ermasari
(Foto/dokumen pribadi)



Leni Haryati John Latief
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Perjuangkan Tambahan Anggaran ke Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Papua Pegunungan Nelson Wenda, yang ditempatkan di Komite IV akan memperjuangkan tambahan anggaran ke daerah. Karena salah satu tugas Komite IV adalah memberikan pertimbangan atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN.

“Saya perjuangkan mengenai anggaran dana transfer ke daerah Provinsi Papua Pegunungan. Sekaligus memastikan penambahan anggaran untuk delapan kabupaten/kota untuk dapat ditingkatkan karena Provinsi Papua Pegunungan adalah daerah otonomi baru yang harus diperhatikan secara serius oleh negara dalam rangka mempercepat dan pemerataan pembangunan,” kata Nelson, Jumat (11/10/2024).

Tidak kalah ‘penting’ tugas Komite IV adalah melakukan pengawasan di bidang anggaran, termasuk pengawasan dana desa. Karena itu, Nelson menyatakan siap untuk mengawal anggaran dana desa, khususnya di Provinsi Papua Pegunungan. Dia juga berharap dana desa di provinsi dipilnya itu ditingkatkan.

Perjuangkan Pemekaran

Beda dengan Nelson anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Papua Barat Lamek Dowansiba. Lamek ditempatkan di Komite I, yang membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,



Nelson Wenda (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Ia merasa bersyukur ditempatkan di Komite I karena banyak ketersinggungannya dengan kepentingan daerah.

”Bergabung di Komite I yang fokus pada kepentingan rakyat adalah sebuah kehormatan bagi saya. Fokus saya pada pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal lalu pembentukan pemekaran kabupaten dan kota. Saya berkomitmen untuk bekerja di bidang yang pro masyarakat terlebih lagi Provinsi Papua Barat akan banyak pemekaran pada tingkat kabupaten dan kota,” kata Lamek.

Selain terkait ketersinggungan langsung dengan daerah, Komite 1 DPD RI juga membidangi politik, hukum dan hak asasi manusia, aparatur negara, wilayah perbatasan negara, pertanahan, agraria dan tata ruang, komunikasi dan informatika, ketentram-

an, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan/pencatatan sipil, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal serta transmigrasi.

“Ini semua merupakan sektor yang sangat penting untuk mendorong kemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah sangatlah vital dan strategis, agar produk regulasi yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan daerah dengan tetap selaras dengan kebijakan pusat,” kata Lamek. (*)



Lamek Dowansiba
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Prioritaskan Isu Lokal

Mirah Midadan Fahmid adalah salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dilantik tanggal 1 Oktober 2024. Dia berkomitmen untuk memperjuangkan isu-isu lokal yang krusial bagi masyarakat di NTB, dengan fokus utama pada kesehatan, pangan, pendidikan, dan energi terbarukan.

Mirah mengungkapkan bahwa isu-isu seperti kesehatan dan pendidikan, serta tantangan terkait energi terbarukan, akan menjadi prioritas utamanya selama lima tahun ke depan. “Isu-isu ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, dan tentunya tidak hanya bisa diatasi oleh satu pihak saja. Banyak pihak yang perlu terlibat, termasuk pemerintah daerah, serta kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” ujar Mirah, Jumat (4/10/2024).

Sebagai anggota DPD RI, Mirah menekankan pentingnya membangun jembatan komunikasi yang kuat antara senator, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Strategi yang ia siapkan bertujuan memperkuat kolaborasi ini untuk memaksimalkan penyerapan aspirasi masyarakat di NTB, serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Dia mengakui bahwa setiap



Mirah Midadan Fahmid (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

senator mungkin memiliki strategi masing-masing. Tapi dengan latar belakangnya yang pernah bergabung di INDEF serta pernah menjadi asisten peneliti di ISPEI, Makassar, dia akan memberikan saran dan rekomendasi yang searah dengan rencana pembangunan nasional dan daerah.

Karena itu, dalam masa tugasnya sebagai anggota DPD RI, Mirah akan terus memperjuangkan pembangunan NTB dengan memberikan masukan melalui *policy brief* yang disusun setiap enam bulan atau satu tahun sekali. *Policy brief* ini akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana pembangunan daerah di NTB secara keseluruhan. Melalui pendekatan ini, Mirah optimis mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan sosial, maupun penguatan ekonomi lokal.

Mirah juga menyoroti

pentingnya peran DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat, tidak hanya dari kelompok-kelompok tertentu, tetapi secara luas dari berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa peran DPD RI adalah untuk menjembatani kebutuhan masyarakat daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. “Program-program dan anggaran nasional sering kali berada di pusat, dan di sinilah peran kami sebagai penghubung yang memfasilitasi kemakmuran pembangunan di daerah,” jelasnya.

Mirah mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar dengan spesifik isu ekonomi pembangunan. Mirah kemudian melanjutkan pendidikannya di University of Glasgow, Skotlandia pada jurusan ekonomi pembangunan. Hingga saat ini, Mirah sedang menyelesaikan program doktoral di Universitas Indonesia dengan mengambil topik penelitian tentang transisi energi di Indonesia. (*)



Perjuangkan Kekayaan SDA Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara La Ode Umar Bonte dipercaya sebagai Wakil Ketua Komite II yang membidangi pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Dia mengaku, dengan masuk dipimpinan Komite II, sangat relevan dengan daerah pemilihannya di Sulawesi Tenggara yang kaya akan sumber daya alam.

“Kita mengetahui, Sulawesi Tenggara itu adalah daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar. Tentunya, sebagai Wakil Ketua Komite II, saya akan memperjuangkan memastikan bahwa sumber daya alam (SDA) yang ada memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara,” katanya, Kamis (10/10/2024).

Sedangkan anggota DPD RI dapil Provinsi Bengkulu Destita Khairilisani menyatakan komitmennya untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pembangunan dan kemajuan daerah, khususnya Provinsi Bengkulu.

“Bergabung di Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) sangat penting dalam pemanfaatan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (raperda)



La Ode Umar Bonte (Foto Matalokal.com)

serta peraturan daerah (perda). Harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah sangatlah vital agar produk regulasi yang dihasilkan dapat mendukung pembangunan daerah dengan tetap selaras dengan kebijakan nasional,” jelas Destita, Rabu (9/10/2024)..

Selain di BULD, Destita juga bergabung di Komite III, yang membidangi pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, hingga perlindungan anak, tenaga kerja, dan ekonomi kreatif. Menurut Destita, Komite III merupakan sektor yang sangat penting untuk mendorong kemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Destita juga bergabung di alat kelengkapan DPD RI lainnya, yaitu Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP). Dia menilai peran BKSP penting dalam meningkatkan

hubungan bilateral dengan berbagai lembaga serta negara lain. “Kerja sama internasional melalui BKSP diharapkan dapat berdampak pada peningkatan perekonomian daerah, karena hubungan bilateral yang kuat mampu membuka peluang investasi dan kerja sama lainnya,” jelasnya. (*)



Destita Khairilisani
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Mendorong Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Jawa Timur Lia Istifhama mengatakan, keberhasilan pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi kutub pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya lokal, pembangunan ekonomi daerah mengalami kemajuan dari sisi nilai ekonomi,” kata senator yang akrab disapa Ning Lia itu, Kamis (10/10/2024).

Karena itu, Ning Lia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus bekerja sama dengan masyarakat dan swasta dalam menciptakan lapangan kerja guna menyerap tenaga kerja yang ada supaya masalah pengangguran berkurang. Karena itu, dia mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Bagaimana pun KEK tersebut bisa menyerap tenaga lokal.

Di Indonesia saat sudah ada 22 KEK, termasuk di Jawa Timur. Pembangunan KEK berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Secara kumulatif sejak berdiri KEK hingga Juni tahun 2024, 22 KEK mencatatkan investasi senilai Rp205,2 triliun. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja di seluruh KEK mencapai

132.227 orang, dari total 368 jumlah pelaku usaha yang aktif di KEK.

Untuk percepatan pengem-

banan industri di KEK, Pemerintah Provinsi Jatim telah menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan digital IT dan universitas luar negeri. Kerja sama itu untuk mencetak tenaga-tenaga handal dan profesional di berbagai bidang untuk siap berkiprah di industri tersebut. Misalnya menggandeng King's College University dan West Australian University yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menelurkan SDM yang siap diberdayakan di industri yang berkembang pesat ini.

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja perlu terus dilakukan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja. Program lainnya bisa dengan pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan instruktur.

“Ini untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam, khususnya di kawasan KEK,” pungkasnya. (*)



Lia Istifhama
(Foto Istimewa)



Perjuangkan Nasib Honorier

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Provinsi Aceh Azhari Cage mengangkat permasalahan mengenai status tenaga Non-ASN atau honorer dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahun Anggaran 2024. Dia menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan komprehensif terhadap penataan tenaga Non-ASN yang selama ini berkontribusi besar pada instansi pemerintahan.

Azhari menyatakan bahwa pemerintah telah membuka rekrutmen dan seleksi PPPK sebagai bagian dari kebijakan penataan tenaga Non-ASN sesuai amanat Pasal 66 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, hingga saat ini, implementasi kebijakan tersebut masih belum menunjukkan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini memicu ketidakpastian bagi banyak tenaga Non-ASN, yang kini diwajibkan mendaftar seleksi PPPK 2024.

Banyak tenaga Non-ASN yang merasa terbatas oleh ketidaksesuaian formasi dan kualifikasi jurusan yang tersedia. Ketika mereka mencoba mendaftar melalui akun Sistem Seleksi Calon

Aparatur Sipil Negara (SSCASN), sebagian besar tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran karena formasi yang ada tidak mengakomodasi kualifikasi pendidikan yang mereka miliki. Kondisi ini memicu kekecewaan, terutama bagi tenaga Non-ASN yang telah lama mengabdikan dan mengikuti seleksi PPPK sebelumnya.

“Kami memohon agar pemerintah mempertimbangkan perubahan kebijakan pada seleksi PPPK 2024 dengan membuka formasi yang menerapkan kualifikasi pendidikan secara umum, sehingga seluruh jurusan dapat mendaftar dalam formasi tersebut.” kata Azhari, dalam Sidang Paripurna DPD RI, Rabu (9/10/2024).

Selain itu, dia mengusulkan agar para pelamar Non-ASN Tenaga Honorier Kategori II (THK2) dan Non-ASN yang telah terdata dalam *database* BKN, serta tenaga Non-ASN dengan masa kerja minimal dua tahun, diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan diangkat sebagai PPPK baik *full time* maupun *part time*. “Pemerintah pusat dan daerah perlu segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tenaga Non-ASN,” kata Azhari. (*)



Hakim Mengadu ke DPD RI



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin dan Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai bersama perwakilan SHI.
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Puluhan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI), mengadu ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Mereka diterima oleh Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung, di ruang GBHN Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Para hakim itu menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan mereka yang selama 12 tahun tidak

mengalami kenaikan. Gaji dan tunjangan hakim saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012. Dalam menuntut kesejahteraan itu, para hakim melakukan mogok kerja dengan cuti bersama selama lima hari dari 7 sampai 11 Oktober 2024.

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, merespons dengan baik aspirasi yang disampaikan para hakim itu. "Atas nama lembaga, kami mengapresiasi pengabdian para yang mulia hakim di seluruh daerah,

pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung," kata Sultan sembari menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk membicarakan masalah kesejahteraan hakim.

Sultan mengakui bahwa hakim dengan tugasnya yang begitu mulia, patut mendapatkan hak kesejahteraan yang layak dan berkecukupan dari negara, termasuk jaminan keamanan saat bertugas di daerah. Kesejahteraan



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung bersama para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

hakim sedikit banyak menentukan kualitas penegakan hukum dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. “Kami ingin mengusulkan, jika perlu, para hakim yang mulia yang muslim dibesarkan umrah atau haji secara gratis oleh pemerintah,” kata Sultan.

Namun, lanjutnya, sebagai utusan masyarakat daerah, Sultan juga berharap agar para hakim memperkuat supremasi hukum di negara demokrasi ini dengan menegakkan keadilan setegak-tegaknyanya. Karena seorang hakim

adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Selain itu, Sultan mengingatkan jangan sampai ada hakim yang harus terpaksa menggadai integritasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seperti diketahui, hakim seluruh Indonesia melakukan aksi mogok kerja dalam bentuk “Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia” dari tanggal 7 sampai 11 Oktober 2024. Aksi itu mereka lakukan sebagai bentuk protes atas sikap pemerintah yang belum memprioritaskan kesejahteraannya.

Gaji pokok hakim saat ini masih sama dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS) biasa. Padahal, tanggung jawab dan beban mereka lebih besar. Kondisi ini mengakibatkan penghasilan hakim merosot drastis ketika mereka pensiun. Selain gaji pokok, tunjangan jabatan hakim juga tidak berubah dan disesuaikan selama 12 tahun terakhir. Akibatnya, nilai tunjangan yang saat ini diterima hakim disebut tidak relevan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup. (*)

Hadiri Peringatan HUT TNI Ke-79 Sultan Bangga dengan Alutsista TNI



Atraksi pesawat tempur milik TNI di langit Monas saat gladi bersih HUT ke-79 TNI. (Foto Antara)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lapangan Monas, Jakarta, 5 Oktober 2024. Sultan mengaku bangga dan terkesima dengan kemajuan alat dan sistem persenjataan prajurit TNI yang dipamerkan dalam parade militer tersebut.

“Kami sangat bangga

melihat perjuangan dan rasa nasionalisme yang tinggi dari para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Semoga perjuangan ini tetap berlanjut dengan alat utama sistem senjata (alutsista) yang semakin modern dan maju,” ujar Sultan kepada awak media saat meninggalkan Lapangan Monas.

Menurut Sultan, TNI harus terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan melakukan

inovasi sistem persenjataan, baik secara mandiri maupun melalui pendekatan diplomasi militer bersama negara sahabat. Sebab, tantangan TNI saat ini adalah memastikan alutsista semakin modern dan canggih agar mampu bersaing dengan negara lain.

Prajurit TNI juga perlu bertransformasi dan terlibat dalam kegiatan non-militer. Prajurit TNI harus diberikan kesempatan yang sama



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Panglima TNI beserta tiga kepala staf angkatan dan Kapolri. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

untuk mengembangkan potensi dan minatnya pada aktivitas bisnis dan ekonomi, selama tidak mengganggu jati dirinya sebagai prajurit TNI. “Kami berharap TNI turut aktif dalam menyukseskan program pembangunan ekonomi dan pertahanan. Semangat dan disiplin prajurit TNI sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun lokal,” tegas Sultan.

Sultan juga meminta agar TNI menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendukung program pembangunan nasional yang dipimpin oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto ke depan. Atas nama lembaga DPD

RI, dia juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertahanan RI yang telah bekerja keras memperkuat sistem pertahanan dan alutsista TNI. Hal ini sangat penting bagi kedaulatan negara dan pengakuan negara lain terhadap Indonesia.

Sejarah Singkat TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945, dengan nama awal Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pembentukan ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada awalnya, TKR terdiri

dari berbagai laskar perjuangan rakyat dan tentara bekas anggota militer Jepang yang masih berada di Indonesia.

Perjalanan TNI terus berkembang, terutama melalui beberapa transformasi organisasi dan peran. Pada tahun 1947, nama TKR diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), menandakan formalitas lebih kuat sebagai angkatan bersenjata resmi negara. TNI telah terlibat dalam berbagai operasi militer, baik dalam mempertahankan kedaulatan negara, operasi non-militer, maupun menjaga stabilitas nasional melalui tugas-tugas kemanusiaan dan bantuan sosial. (*)

Bertemu Dubes Arab Saudi Sultan Bahas Penyelenggaraan Haji

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin memenuhi undangan makan malam Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Faisal Bin Abdullah Al-Amudi di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Pada kesempatan itu, Sultan juga menyertakan sejumlah anggota DPD RI, terutama dari Komite III.

“Saya sangat bahagia dan merasa tersanjung dengan jamuan istimewa untuk saya bersama rombongan Senator Indonesia pada malam ini,” ujar Sultan dalam *gala dinner* yang berlangsung hangat dengan nuansa khas negara Timur Tengah itu. Lebih membahagiakan Sultan lagi, pada jamuan makan malam itu hadir sahabatnya, Syaikh Ahmad bin Ali Al Hudzaifi, Imam Besar Masjid Nabawi Madinah.

Pada kesempatan jamuan makan malam itu, Sultan memanfaatkan momen untuk membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji dengan Dubes. “Secara khusus kami mendiskusikan soal upaya peningkatan kualitas pelayanan haji kepada jamaah haji Indonesia. Kami berpandangan bahwa penambahan kuota haji harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan terhadap



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin bersama Duta Besar Kerajaan Arab Saudi Faisal Bin Abdullah Al-Amudi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

jamaah, baik dalam proses perjalanan, kenyamanan dalam tenda penginapan, kualitas makanan, hingga kepulangannya ke tanah air,” jelas Sultan.

Menurut Ketua Ambassador Club Indonesia itu, kenyamanan jamaah haji selama berada di Tanah Suci sangat menentukan dan mempengaruhi kualitas ibadah haji. Ibadah yang membutuhkan energi dan biaya yang besar ini harus dilaksanakan secara maksimal dan mabrur. “Oleh karena itu, kami sengaja mengajak pimpinan dan anggota Komite III DPD RI untuk mengurai persoalan tersebut bersama sahabat saya Dubes Faisal,” terangnya.

Pada kesempatan yang

hangat itu, Dubes Arab Saudi Faisal juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Sultan B. Najamudin sebagai Ketua DPD RI. Imam Besar Masjid Nabawi juga mendoakan Sultan agar mendapatkan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Adapun Senator yang turut mendampingi *gala dinner* bersama Imam Besar Masjid Nabawi Madinah adalah Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Filep Wamafma (Papua), Prof. Dailami Firdaus (Jakarta), Dharma Setiawan (Kepri), Zuhri M Syazali (Kep. Babel), Jelita Donal (Sumatera Barat), dan seorang Senator Wanita asal Kalimantan Tengah dr. Ernie Daryanti. (*)

Kasus Korupsi di Daerah Karena Lemah Pengawasan

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin

Teras Narang menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan anggaran negara, terutama yang dialokasikan ke daerah. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan pengawasan yang lebih ketat di semua tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa.

“Salah satu kelemahan pembangunan selama ini adalah lemahnya pengawasan berjenjang. Pengawasan ini harus ditingkatkan, mulai dari pusat sampai daerah. Selain pengawasan, upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal. Pada akhirnya, penindakan yang tegas, konsisten, serta konsekuen harus diterapkan,” kata Teras Narang, dalam *Podcast Lider* yang dipandu oleh sahabat Freddy Ndolu, Sabtu (5/10/2024).

Menurutnya, lemahnya pengawasan kerap kali menjadi penyebab utama munculnya masalah dalam tata kelola keuangan daerah. Teras juga menekankan bahwa tanggung jawab pembangunan dan keuangan daerah terletak pada pimpinan di setiap sektor. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pentingnya pengawasan



Agustin Teras Narang (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

agar pembangunan berjalan sesuai dengan harapan.

Teras mengingatkan akan pentingnya komitmen dalam pengawasan, terutama setelah munculnya operasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan bagian timur dan selatan. Kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut merupakan tanda lemahnya pengawasan internal di pemerintahan daerah. “Hal ini menegaskan pentingnya profesionalitas, kapabilitas, dan integritas pimpinan daerah dalam mengawal pembangunan,” kata Teras Narang.

Senator dari Kalimantan Tengah itu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta memperkuat DPD RI dengan mengawasi jalannya pembangunan di daerah masing-masing. Sebab, pe-

ngawasan yang ketat terhadap politik anggaran akan memastikan pembangunan berpihak pada kepentingan jangka panjang demi kemajuan daerah dan kemakmuran masyarakat.

Teras menegaskan peran DPD RI tidak boleh dipandang sebelah mata. Baginya, posisi strategis DPD RI perlu terus diperkuat, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan yang lebih intensif.

“Alih-alih memandang lemah posisi DPD RI, saya akan fokus pada optimalisasi fungsi lembaga ini sesuai amanat konstitusi. Dengan langkah ini, diharapkan DPD RI dapat semakin berperan dalam memastikan anggaran negara digunakan secara bijak dan tepat sasaran untuk kepentingan rakyat,” kata Teras Narang. (*)

Nono Kutuk Serangan Israel Melukai Dua Prajurit TNI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengungkapkan keprihatinannya dan mengemukakan keras serangan militer Israel di Lebanon yang menyebabkan dua prajurit TNI, yang tergabung dalam pasukan perdamaian Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB), terluka dalam peristiwa tersebut.

Menurut mantan Komandan Korps Marinir itu, Israel Defense Forces (IDF) dan semua pihak terkait seharusnya memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan personel PBB. “Saya sangat prihatin atas kejadian ini. Keselamatan dan kesehatan prajurit adalah prioritas utama, dan hak-hak PBB harus dihormati serta dijamin tidak terganggu dalam kondisi apa pun,” tegas Nono, Jumat (11/10/2024).

Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701. Setiap serangan terhadap

personel atau properti PBB adalah tindakan yang tidak dapat dibiarkan. Karena itu, dia mendukung sikap tegas Indonesia terhadap pelanggaran tersebut.

Senator dari Maluku itu juga mengajak masyarakat internasional untuk lebih tegas dalam menegakkan perdamaian dunia, serta mendesak semua pihak menghormati mandat PBB dalam menjaga stabilitas di wilayah konflik. “Pasukan perdamaian yang hadir di Lebanon Selatan untuk mendukung pemulihan stabilitas. Setiap bentuk kekerasan terhadap mereka harus ditindak tegas,” ujarnya.

UNIFIL (United Na-

tions Interim Force in Lebanon) sebelumnya telah merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa serangan Israel terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701.

Insiden tersebut terjadi ketika tank Merkava milik IDF menembaki menara pengamatan di markas UNIFIL di Naqoura, Lebanon, yang menyebabkan dua prajurit penjaga perdamaian terluka. Saat ini, kedua prajurit berada dalam kondisi stabil dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit militer. (*)



Nono Sampono
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Hilmy Apresiasi Pemerintah Evakuasi WNI di Lebanon

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Hilmy Muhammad mengapresiasi gerak cepat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dalam mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) di Lebanon setelah situasi keamanan di negara tersebut memburuk akibat perang dengan Israel.

“Situasi di Lebanon saat ini sudah semakin memburuk. Pemerintah melalui Kemenlu sudah bertindak cepat. Kita melihat upaya yang luar biasa. Alhamdulillah saudara-saudara kita, anak-anak kita yang di Lebanon sudah berhasil dievakuasi. Kami sampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas tindakan cepatnya ini,” kata Hilmy, Selasa (8/10/2024).

Jika masih ada WNI yang bertahan, ia meminta agar mereka mengikuti arahan pemerintah. Sebab menurutnya, menjaga keselamatan lebih utama daripada bekerja atau belajar. Dia mengimbau WNI yang masih bertahan di Lebanon, baik yang bekerja maupun belajar, untuk mempertimbangkan kembali agar pulang ke Tanah Air karena keselamatan adalah prioritas.

Menurut keterangan diaspora Indonesia di Yordania, Ayyun Anniqo, evakuasi tersebut dilakukan dalam lima tahap. Sejak 10 Agustus 2024, WNI di Leba-



Hilmy Muhammad (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

non diterbangkan ke Indonesia melalui Yordania. Pada tahap terakhir, rute yang diambil berbeda karena kondisi di Lebanon sudah tidak kondusif.

Dia menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Israel tidak lagi bisa disebut perang, melainkan genosida atau pembunuhan besar-besaran. Serangan Israel ke Palestina sudah mencapai lebih dari 250.000 serangan tanpa memandang sasaran. Lebih dari 40.000 orang tewas dan lebih dari 90.000 orang terluka. Kini Israel pun melancarkan serangan ke Lebanon.

Oleh karena itu, Hilmy meminta Pemerintah Indonesia untuk terus menyuarakan perdamaian dunia. Ia juga mendorong agar Indonesia tetap

melakukan perlawanan terhadap Israel dan sekutunya hingga sanksi dijatuhkan oleh PBB. Ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk membentuk koalisi bersama negara-negara besar agar bisa mengakhiri penjajahan Israel dan sekutunya. “Pemerintah Indonesia perlu memikirkan upaya membentuk koalisi baru dengan negara-negara besar, seperti China dan Rusia, serta negara-negara kaya di Timur Tengah, agar terlepas dari penjajahan Israel dan sekutunya, untuk merancang tata dunia baru yang lebih adil dan lebih baik,” kata Hilmy. (*)

Hakim Desak Pemerintah Hentikan Agresi Israel ke Palestina

Senator dari Provinsi Lampung Abdul Hakim, meminta kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI secara kelembagaan untuk mendesak dan mendorong Pemerintah Indonesia agar menghentikan agresi dan penjajahan Israel terhadap Palestina dengan segala cara yang memungkinkan.

“Saya menyampaikan bela sungkawa karena tepat hari ini, setahun lalu, pada 7 Oktober, Israel melakukan agresi besar-besaran, genosida terus menerus terhadap warga sipil di Gaza, Palestina, dan ini harus segera dihentikan,” ujar Hakim dalam interupsinya pada Sidang Paripurna ke-5 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025, Senin (7/10/2024).

Dalam interupsinya itu, Hakim menyampaikan dua hal. Pertama, mendesak dan mendorong pemerintah untuk terus-menerus menginisiasi berbagai

upaya mengajak bangsa-bangsa di dunia agar memaksa Israel segera menghentikan kebiadabannya, yaitu agresi dan penjajahan yang tidak berperikemanusiaan terhadap bangsa Palestina.

Kedua, melalui Pimpinan DPD RI, dia mengajak lembaga DPD RI untuk menyerukan kepada Kongres dan Senator Amerika Serikat agar menghentikan segala bentuk dukungannya kepada Israel, dengan tujuan untuk tidak menerapkan standar ganda menuju perdamaian dunia yang abadi, berperikemanusiaan, dan berkeadilan.

Perlu diketahui, pada 7 Oktober 2023, Israel melakukan agresi besar-besaran di Gaza, Palestina, yang telah merenggut puluhan ribu jiwa warga sipil, dengan lebih dari 41.870 orang meninggal, di antaranya 10.888 anak-anak. Selain itu, sebanyak 456 sekolah, universitas, dan gedung pendidikan juga hancur dan rusak.

“Karenanya, usulan terhormat ini saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini sebagai bentuk bela sungkawa atas penderitaan yang dialami rakyat Palestina. Kita doakan semoga rakyat Palestina segera mendapatkan kemerdekaannya,” tutup

Senator asal Lampung ini. (*)



Abdul Hakim (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Abcandra Muhammad Akbar Pimpinan MPR RI dari DPD RI

Melalui Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024), terpilih Abcandra Muhammad Akbar Supratman, senator dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah (Sulteng), sebagai Pimpinan MPR RI dari unsur DPD RI periode 2024-2029.

Pemilihan Pimpinan MPR RI unsur DPD RI tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2024 tentang Tatib. Seluruh Anggota DPD RI dapat mencalonkan diri dengan syarat dukungan empat anggota dari setiap subwilayah. Bakal calon Pimpinan MPR RI yang memenuhi syarat dan telah diverifikasi oleh Pimpinan DPD RI dapat mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya.

Dalam pemilihan yang dipimpin Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, didampingi Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dedi Iskandar Batubara dan Sekretaris Kelompok DPD RI Abraham Liyanto, muncul enam calon, yaitu Ahmad Nawardi (Jawa Timur), Daud Yordan (Kalimantan Barat), Agustin Teras Narang (Kalimantan Tengah), Maya Rumantir (Sulawesi Utara), Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Sulawesi Tengah), dan Fadel Muhammad (Gorontalo).

Dalam proses pemilihan yang dihadiri 143 anggota



Abcandra Muhammad Akbar Supratman bersama Ketua DPD RI Sultan B Najamudin usai terpilih untuk menduduki kursi Pimpinan MPR RI. (Foto Biro PHM Setjen PPD RI)

DPD RI, terpilih Abcandra Muhammad Akbar Supratman sebagai Pimpinan MPR RI dari Kelompok DPD RI dengan perolehan suara tertinggi, yaitu 93 suara, mengungguli perolehan suara Fadel Muhammad yang merupakan calon *incumbent*. Pada pemilihan putaran pertama, Abcandra meraih 45 suara, Fadel Muhammad 38 suara, Daud Yordan 29 suara, Agustin Teras Narang 17 suara, Ahmad Nawardi 13 suara, dan Maya Rumantir satu suara.

Sebagai generasi milenial, Akbar berharap melalui kepemimpinannya dapat memberikan perubahan bagi DPD RI dengan membangun kolaborasi lintas generasi. "Kita dihadapkan pada bonus demografi, saya akan mewakafkan diri saya untuk konstelasi ini. Sebagai generasi milenial, saya akan membangun kolaborasi lintas generasi dengan memak-

simalkan penguatan lembaga DPD RI di fraksi-fraksi MPR RI," ujar Akbar, usai terpilih.

Sehari kemudian, Akbar dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI bersama dengan Pimpinan MPR RI lainnya dari unsur fraksi-fraksi, dalam Sidang Paripurna Ke-III MPR RI, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Lengkapnya, Pimpinan MPR RI adalah sebagai berikut: Ketua Ahmad Muzani (Fraksi Gerindra), Wakil Ketua: Bambang Wuryanto (Fraksi PDIP), Kahar Muzakir (Fraksi Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi NasDem), Rusdi Kirana (Fraksi PKB), Hidayat Nur Wahid (Fraksi PKS), M. Eddy Dwiyanto Soeparno (Fraksi PAN), Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Demokrat), dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD RI). (*)

Sidang Paripurna DPD RI Sahkan Pimpinan Alkel Tahun 2024-2025



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengetok palu pengesahan pimpinan alat kelengkapan (alkel) untuk tahun sidang 2024-2025, pada Sidang Paripurna Ke-6 DPD RI, Rabu (9/10/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Sidang Paripurna Ke-6 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Rabu (9/10/2024), telah mengesahkan pimpinan alat kelengkapan (alkel) untuk tahun sidang 2024-2025. Pemilihan pimpinan alkel tersebut dilakukan berdasarkan keterwakilan subwilayah keanggotaan pada Senin (7/10/2024), yang dipimpin oleh Pimpinan DPD RI.

“Berdasarkan keputusan rapat di masing-masing Alat Kelengkapan DPD RI, telah terpilih Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2024-2025. Apakah bisa disetujui?” tanya Ketua DPD RI Sultan B Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung. Kemudian

Berikut nama-nama yang akan memimpin Alat Kelengkapan DPD RI.

Komite I

Ketua	: Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
Wakil Ketua	: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
Wakil Ketua	: Bahar Buasan (Babel)
Wakil Ketua	: Muhdi (Jawa Tengah)

Komite II

Ketua	: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
Wakil Ketua	: Angelius Wake Kako (NTT)
Wakil Ketua	: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
Wakil Ketua	: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

Komite III

Ketua	: Filep Wamafma (Papua Barat)
Wakil Ketua	: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
Wakil Ketua	: Jelita Donal (Sumatera Barat)
Wakil Ketua	: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

Komite IV

Ketua	: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
Wakil Ketua	: Novita Anakotta (Maluku)
Wakil Ketua	: Sinta Rosma Yenti (Kaltim)
Wakil Ketua	: Arif Eka Saputra (Riau)



Pemilihan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dipimpin Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas. Palu pimpinan diserahkan Hemas kepada Sewitri (Wakil Ketua PPUU). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

dijawab dengan kata “setuju” oleh peserta sidang.

Pada Sidang Paripurna ini, Pimpinan DPD RI juga menyepakati Keanggotaan Panitia Musyawarah (Panmus) 2024-2025. “Dengan telah terpenuhinya keterwakilan seluruh provinsi dalam keanggotaan Panitia Musyawarah, apakah Keanggotaan Panmus Tahun Sidang 2024-2025 dapat kita setujui?” tanya Sultan. Pertanyaan tersebut kembali dijawab dengan kata “setuju” oleh para senator yang hadir, disertai ketukan palu oleh Sultan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, serta Pasal 54 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, ketua alkel secara otomatis menjadi anggota Panmus. Sedangkan provinsi yang belum terwakili atau yang tidak memiliki ketua alat kelengkapan, diusulkan oleh anggota dari setiap provinsi. (*)

BULD DPD RI

- Ketua : Stefanus BAN Liow (Sulut)
- Wakil Ketua : Marthin Billa (Kaltara)
- Wakil Ketua : Abdul Hamid (Riau)
- Wakil Ketua : Agita Nurfianti (Jabar)

PURT DPD RI

- Ketua : Hasan Basri (Kaltara)
- Wakil Ketua : Elisa Ermasari (Bengkulu)
- Wakil Ketua : Muhammad Rifki Farabi (NTB)
- Wakil Ketua : Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

PPUU DPD RI

- Ketua : Abdul Kholik (Jateng)
- Wakil Ketua : Riedno Graal Taliawo (Malut)
- Wakil Ketua : Sewitri (Riau)
- Wakil Ketua : Muhammad Hidayattollah (Kalsel)

BKSP DPD RI

- Ketua : Gusti Farid Hasan Aman (Kalsel)
- Wakil Ketua : Darmansyah Husein (Babel)
- Wakil Ketua : Mirah Midadan Hamid (NTB)
- Wakil Ketua : Lis Tabuni (Papua Tengah)

BAP DPD RI

- Ketua : Abdul Hakim (Lampung)
- Wakil Ketua : Yulianus Henock Sumual (Kaltim)
- Wakil Ketua : Ahmad Syauqi Soeratno (DIY)
- Wakil Ketua : Nelson Wenda (Papua Pegunungan)

BK DPD RI

- Ketua : Ismeth Abdullah (Kep. Riau)
- Wakil Ketua : Evi Apita Maya (NTB)
- Wakil Ketua : Siti Aseanti (Kalteng)
- Wakil Ketua : Hasby Yusuf (Malut)

RDP dengan Kemenpora Komite III Soroti Masalah PON XXI

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) pada Selasa (15/10/2024), Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyoroti berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatra Utara (Aceh-Sumut).

Dalam RDP yang dihadiri Sekretaris Kemenpora, Gunawan Suswanto, Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyampaikan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan PON XXI, yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 20 September 2024 lalu. “Jika dibandingkan dengan PON Papua, itu sangat meriah, bahkan sepertinya menjadi yang terbesar di Indonesia. Hal yang sama seharusnya dirasakan oleh PON Aceh-Sumut, tetapi kita tidak melihat hal tersebut,” ucap Filep.

Filep menyatakan bahwa hasil pengawasan Komite III DPD RI menemukan beberapa masalah dalam penyelenggaraan PON XXI. Pertama, keterbatasan infrastruktur, di mana beberapa *venue* masih belum selesai dibangun dan masih dalam tahap renovasi. Kedua, terdapat keterbatasan anggaran, terutama



Suasana rapat Komite III dengan Kemenpora. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

karena adanya pemotongan dari pemerintah pusat untuk kegiatan PON XXI di Sumut. Ketiga, banyak keluhan dari atlet mengenai akomodasi yang kurang layak. Keempat, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kelima, persiapan atlet dan kontingen yang kurang didukung oleh sarana serta prasarana latihan yang memadai untuk meningkatkan daya saing,” jelas Filep, senator asal Papua Barat.

Gunawan Suswanto tidak menampik adanya permasalahan dalam *event* nasional terbesar di Indonesia tersebut. Namun, ia mengklaim bahwa penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut tetap dianggap sukses dan menjadi PON terbesar dalam sejarah.

PON XXI juga menghasilkan peningkatan prestasi atlet dan sukses memberdayakan ekonomi daerah. “Ini terbukti dengan peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto di Aceh dan Sumut sebesar 2,1%, serta mendorong peningkatan sektor pariwisata dan UMKM,” ujar Gunawan.

Meskipun Kemenpora mengklaim kesuksesan, Anggota DPD RI dari Sumatra Utara, Dedi Iskandar Batubara, mengungkapkan kekecewaannya terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut yang dianggap belum optimal, terutama dari segi fasilitas dan pendanaan. Dedi mengkritik pemerintah pusat yang dinilai kurang memberikan dukungan penuh terkait pendanaan PON. Dari usulan



anggaran sebesar Rp7 triliun untuk membangun *venue*, hanya disetujui Rp1,1 triliun dan akhirnya hanya mendapat Rp400 miliar.

“Ini sangat tidak *fair*, seharusnya anggaran dipenuhi secara utuh oleh pemerintah. Ini adalah kekecewaan masyarakat Sumut yang harus saya sampaikan. Kami berharap hal ini tidak terulang di masa depan, terutama pada PON berikutnya di NTB dan NTT,” tegas Dedi.

Anggota DPD RI dari Lampung, Ahmad Bastian SY, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut, terutama dari segi anggaran, yang menyebabkan berbagai permasalahan yang disorot masyarakat.

“Saya memahami betapa terpukulnya Pak Dedi (Iskandar Batubara) karena sebagai wakil daerah, kami membawa nama daerah di mata nasional. Saat PON (Aceh-Sumut) disorot oleh seluruh masyarakat Indonesia, kami juga merasa terbebani dengan permasalahan yang ada,” jelas Ahmad Bastian.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Erni Daryanti, menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan PON, baik dari segi infrastruktur, aspek non-fisik, maupun anggaran. Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah pusat, termasuk Kemenpora, adalah kewajiban tanpa membebani provinsi tuan rumah secara berlebihan. (*)

Hadapi Ancaman Krisis Pangan Perlu Program Regenerasi Petani

Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) University, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2024). RDPU ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta perubahan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu, didampingi oleh Wakil Ketua Komite II Angelius Wake Kako, A. Abd. Waris Halid, dan La Ode Umar Bonte, menyampaikan bahwa masukan dari RDPU ini akan dijadikan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengawasan. “Seluruh masukan dalam RDPU ini akan dicatat dan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan serta strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran,” ujar Badikenita.

Wakil Ketua Komite II, A. Abd. Waris Halid, menekankan pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia. Menurutnya, perlu ada penyediaan lahan dan teknologi pangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemandirian pangan. “Ada yang salah dalam sistem penanganan kebutuhan pangan kita, karena kemampuan kita masih dalam tahap pemenuhan dan belum bisa mandiri pangan,” tegasnya.

Senator Sulawesi Barat, Andri Prayoga Putra Singkarru, memperingatkan bahwa krisis pangan sudah di depan mata dan memerlukan langkah-



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI bersama pakar dari IPB University, usai menggelar rapat dengar pendapat umum. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

langkah strategis dari pemerintah. Ia menekankan pentingnya program regenerasi petani untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan ke depan. Senator NTB, Mirah Midadan Fahmid, juga menyarankan pentingnya diversifikasi pangan di setiap daerah sebagai pengganti beras untuk mencegah krisis pangan.

Senator asal Bali, Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, menyorotkan keprihatinan atas nasib petani yang kesulitan menghadapi harga pupuk yang mahal serta kesulitan mempertahankan lahan pertanian. Menurutnya,

sistem pengairan pun semakin tergerus oleh investasi, sehingga petani semakin sulit menjaga ketahanan pangan. “Posisi petani menjadi tidak terhormat, padahal tugas mereka sangat mulia dalam menyediakan pangan bagi masyarakat,” ucapnya.

Dari perspektif akademik, Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB University, Widiatmaka, memberikan pandangan bahwa UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan lebih fokus pada ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan serta perlindungan

petani. Sementara UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja lebih menitikberatkan pada kemudahan investasi dan deregulasi di sektor agrikultura.

Wakil Ketua Komite II, Angelius Wake Kako, menambahkan bahwa RDPU ini menjadi langkah awal untuk mendapatkan pemahaman berbasis data sebelum kunjungan pengawasan ke daerah. “Seluruh masukan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih tepat sasaran,” tutup Angelius. (*)

Penyediaan IGD Klinik Pratama Jadi Perhatian Setjen DPD RI

Klinik Pratama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkomitmen untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anggota DPD RI dan pegawai di lingkungan Setjen DPD RI beserta keluarganya.



Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian, Fitriani Badar, dan Kepala Biro Umum Irma Febrianti beserta pejabat terkait di lingkungan Setjen DPD RI usai kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP), Kamis (26/9/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

“Saya sangat mengapresiasi semangat tim medis Klinik Pratama Setjen DPD RI, karena walaupun dengan keterbatasan tempat, mereka tetap berkomitmen tinggi untuk memberikan pelayanan prima kepada anggota DPD RI, pegawai sekretariat, dan keluarga,” kata Kepala Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian Fitriani Badar, dalam kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP), Kamis (26/9/2024).

Ia juga menanggapi masalah keterbatasan SDM, termasuk tenaga medis yang masih terus diupayakan. Seperti dalam formasi CPNS 2024, dibuka formasi penerimaan pegawai di bidang kesehatan sebanyak lima formasi. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban kerja petugas medis Klinik Pratama Setjen DPD RI sehingga kualitas pelayanan tetap terjaga.

Kepala Biro Umum Setjen

DPD RI Irma Febrianti, mengatakan bahwa biro yang dipimpinnya selalu mengupayakan dukungan penyediaan sarana dan prasarana klinik, terutama untuk penyediaan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Penyediaan IGD menjadi konsen utama Biro Umum saat ini. Beberapa kasus kegawatdaruratan kesehatan pegawai di lingkungan kerja terjadi saat jam kerja, sehingga membutuhkan penanganan khusus dan cepat seperti di IGD. Untuk itu, kami akan segera menyusun rencana perluasan dan penambahan ruang untuk Klinik Pratama Setjen DPD RI,” tutur Irma.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rahmad Yulianto, memaparkan materi standar pelayanan kesehatan dan evaluasi yang berjalan di lingkup Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

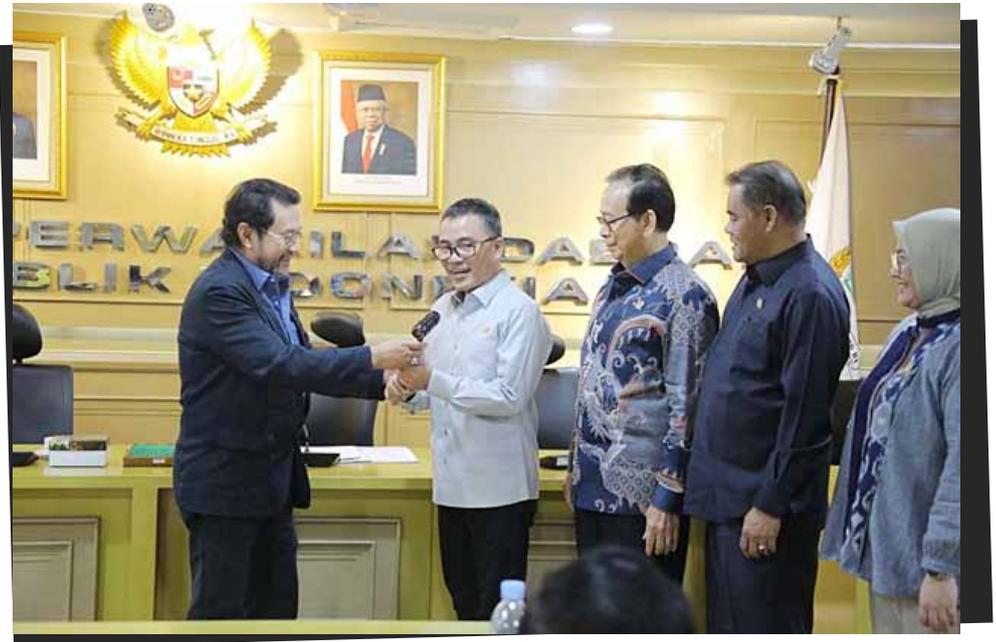
se-DKI sebagai bahan referensi Klinik Pratama DPD RI. “Selain melayani kesehatan masyarakat, Puskesmas juga rutin melakukan evaluasi pelayanan melalui audit internal, penilaian kinerja dari Dinas Kesehatan (Dinkes), survei akreditasi, pengelolaan aduan masyarakat, dan survei kepuasan masyarakat,” ujar Rahmad.

Penanggung jawab Klinik Pratama Setjen DPD RI, Emirianti, memaparkan kebutuhan-kebutuhan klinik yang menjadi urgensi saat ini. Selain IGD dan penambahan tenaga medis, juga diperlukan ruangan untuk tindakan medis. “Diperlukan ukuran ruang yang lebih luas untuk memudahkan pekerjaan tenaga medis, *hotline* khusus poliklinik, dan pelatihan pertolongan pertama untuk Pengamanan Dalam (Pamdal) DPD RI,” pungkas Emirianti. (*)



Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyerahkan palu kepada Pimpinan Komite II DPD RI masa sidang tahun 2024-2025, usai pemilihan pimpinan di komite tersebut, Selasa (8/10/2024). Terpilih sebagai Pimpinan Komite II secara musyawarah mufakat adalah; Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara) sebagai ketua dengan tiga wakil ketua masing-masing: Angelius Wake Kako (NTT), A Abdul Waris Halid (Sulawesi Selatan), dan La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menyerahkan palu pimpinan kepada Pimpinan BULD DPD RI masa sidang tahun 2024-2025 usai pemilihan pimpinan komite tersebut. Terpilih sebagai pimpinan BULD adalah Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara) sebagai ketua dengan tiga wakil ketua, masing-masing: Marthin Billa (Kalimantan Utara), Abdul Hamid (Riau), dan Agita Nurfianti (Jawa Barat). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung bersama pimpinan dan anggota Komite I DPD RI usai pemilihan pimpinan di salah satu alat kelengkapan DPD RI tersebut, Selasa (8/10/2024). Terpilih sebagai pimpinan Komite I adalah Andi Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) sebagai ketua dengan tiga wakil ketua, masing-masing: Carol Simon Petrus (Papua), Bahar Buasan (Bangka Belitung), dan Muhdi (Jawa Tengah). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Eksekutif Tanpa Oposisi: Demokrasi yang Tergadai

Oleh:

Mohammad Isa Gautama

Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberadaan oposisi adalah elemen super-penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Oposisi berperan sebagai pengawas, pengkritik, dan penyeimbang eksekutif, memastikan bahwa kekuasaan tidak dijalankan secara ugal-ugalan.

Namun, dalam kurun beberapa bulan terakhir, kecenderungan melemahnya oposisi di Indonesia semakin mengemuka. Salah satu faktor penyebabnya adalah koalisi besar yang terbentuk antara partai-partai politik utama, mengakibatkan semakin kaburnya batas antara pemerintah dan oposisi.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran serius tentang demokrasi di Indonesia, di mana mekanisme *check and balances* terganggu. Padahal, dalam sistem politik yang demokratis, *check and balances* bertujuan untuk membatasi kekuasaan eksekutif serta menjadi corong masyarakat memainkan peran penting dalam mengkritik dan mengawasi kebijakan. Ketika eksekutif berjalan tanpa oposisi yang kuat, demokrasi sangat berpotensi tergadai oleh kepentingan segelintir elit politik.

Koalisi Besar dan Pudarnya Oposisi

Koalisi besar yang terbentuk dalam pemilihan umum 2024 telah menimbulkan spekulasi



tentang melemahnya oposisi di Indonesia. Ketika partai-partai politik utama, termasuk yang seharusnya berada di kubu oposisi, memutuskan bergabung dengan pemerintahan baru, ruang untuk oposisi semakin menyempit. Sebagaimana disampaikan oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, partai-partai diharapkan untuk “bergotong royong” dalam pemerintahan baru, membuka peluang untuk koalisi yang lebih luas. Ini semakin menguatkan sinyal bahwa oposisi akan semakin sulit terwujud.

Jika memang pada akhirnya PDIP, yang merupakan partai terbesar di Indonesia, memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo (konferensi pers Puan Maharani, 24/9/24), dipastikan kondisi demokrasi di Indonesia semakin memburuk. Peneliti dari beberapa lembaga kajian demokrasi telah memperingatkan bahwa tanpa oposisi yang

kuat, sistem *check and balances* semakin tidak ada arti, ruang kritik terhadap eksekutif akan semakin terbatas. Hal ini berpotensi menyebabkan pemerintahan yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

Check and Balances dalam Demokrasi

Dalam sistem demokrasi, konsep *check and balances* sangat krusial untuk menjaga kekuasaan agar tetap berimbang. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan membatasi agar tidak ada lembaga yang mendominasi. Oposisi berperan sebagai bagian dari sistem besar politik, memastikan bahwa eksekutif tidak berjalan tanpa kontrol. Oposisi tidak hanya penting dalam mengawasi kebijakan, tetapi juga menjadi wakil bagi rakyat yang tidak terwakili oleh partai-partai yang berada dalam pemerintahan.

Menurut William Gumede, Profesor Ilmu Politik di Universitas Witwatersrand sekaligus jurnalis dan aktivis demokrasi, peran partai oposisi sangat penting dalam menentukan tingkat akuntabilitas partai yang berkuasa dan pemerintah, efektivitas pemberian layanan publik, dan kualitas demokrasi suatu negara secara keseluruhan, partai oposisi memberikan visi, kebijakan, dan pemimpin alternatif kepada partai yang berkuasa.

Lebih jauh, peran kaum oposisi juga merambah ranah meneliti keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif dan administrasi publik. Mereka mem-bela kepentingan para pemilih tidak hanya daerah pemilihan mereka tetapi seluruh pemilih di negara tersebut (2023).

Dus, ketika partai-partai besar semuanya bergabung dalam pemerintahan, tidak ada kekuatan politik yang cukup besar untuk mengkurasi dan memoderasi kebijakan pemerintah. Ini menciptakan situasi di mana keputusan yang diambil oleh eksekutif jarang mendapatkan perlawanan, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Sebuah demokrasi tanpa oposisi yang kuat cenderung bergeser ke arah otoritarianisme bahkan diktatorisme, di mana kekuasaan eksekutif tidak terkendali dan kebijakan publik dijalankan tanpa akuntabilitas yang proporsional.

Alarm Bahaya

Kondisi politik di Indonesia saat ini menunjukkan gejala konsolidasi kekuasaan di tangan segelintir elit politik. Koalisi besar dan semakin kaburnya garis antara partai pemerintah dan oposisi menciptakan oligarki politik yang merugikan rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena perdebatan ide-ide dan kebijakan publik, kini lebih menyerupai panggung bagi pembagian kekuasaan dan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Tanpa oposisi yang kuat, rakyat kehilangan ruang penting untuk mengawasi dan

mengkritik pemerintah, yang merupakan pilar esensial dari demokrasi.

Melemahnya oposisi mencerminkan dinamika politik Indonesia pasca reformasi, di mana pragmatisme politik semakin dominan. Partai-partai politik lebih fokus pada perolehan kekuasaan daripada memperjuangkan ideologi atau kepentingan rakyat. Hal ini membuat oposisi, yang seharusnya berperan menantang kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat, justru berupaya masuk ke dalam lingkaran kekuasaan. Akibatnya, aspirasi rakyat yang tidak diakomodasi oleh pemerintah semakin terabaikan.

Pasca-reformasi 1998, Indonesia berhasil melepaskan diri dari otoritarianisme Orde Baru dan membangun sistem demokrasi yang lebih terbuka. Namun, perkembangan politik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pencapaian reformasi ini berada di titik kritis. Konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite kembali terjadi, dan rakyat kehilangan akses untuk memberikan masukan serta kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintahan tanpa oposisi yang kuat berpotensi merusak demokrasi. Kritik yang langka terhadap kebijakan pemerintah membuka peluang bagi praktik korupsi dan pengambilan kebijakan yang merugikan masyarakat. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menyebabkan demokrasi yang semakin tertutup, di mana transparansi dan akuntabilitas hilang, dan kualitas pemerintahan semakin menurun.

Oposisi Harga Mati

Meski demikian, jika memang oposisi di pemerintahan nyaris nol, masih ada harapan yang bisa kita titip kepada kelompok masyarakat sipil yang kritis. Munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengawasi kebijakan pemerintah, keberadaan media independen yang kritis mestilah menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi. Masyarakat sipil, yang didukung penuh elemen kaum intelektual, ilmuwan dan para guru besar, harus terus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan *good governance*, serta memastikan pemerintahan tanpa oposisi masih mau mendengarkan suara mereka.

Kesadaran politik masyarakat juga perlu terus ditingkatkan agar demokrasi tidak hanya menjadi milik segelintir elite politik. Pendidikan politik yang baik, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan penguatan institusi demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga agar demokrasi Indonesia tetap berjalan dengan sehat.

Last but not least, dibutuhkan aksi nyata gerakan sosial yang kritis dari elemen masyarakat sipil sebagai pengisi ruang kosong oposisi untuk mengkurasi kebijakan pemerintah di era pasca Jokowi. Jika tidak, demokrasi akan tergadai. Apa pun yang terjadi, oposisi adalah pilar penting dalam demokrasi. Hilangnya oposisi yang kritis berarti melemahkan kekuasaan rakyat untuk mengontrol jalannya pemerintahan.

(*Penulis adalah dosen Komunikasi Politik dan Kepala Gerakan Bersama Antikorupsi Universitas Negeri Padang).

Empat Kuliner Menggiurkan dari Sumbawa, NTB

Four Mouth-Watering Delicacies from Sumbawa, NTB

1 Ikan Sepat / Gourami Fish

Salah satu makanan khas dari Sumbawa adalah Sepat, hidangan tradisional yang segar dan nikmat. Sepat biasanya dibuat dari ikan bakar atau ikan rebus yang disiram dengan kuah asam dari campuran air asam jawa dan jeruk. Kuahnya diberi tambahan sambal yang pedas, daun kemangi, tomat, dan irisan bawang merah, memberikan rasa segar dan pedas sekaligus. Hidangan ini sering dinikmati dengan nasi putih dan lauk lainnya. Sepat menjadi favorit masyarakat Sumbawa karena kesederhanaannya dan cita rasa yang segar serta khas.



Foto Kabar Sumbawa

One of typical foods of Sumbawa is gourami, a traditional delicacy which is fresh and tasty. Gourami is normally made from grilled or boiled fish smothered in sour sauce made of concoction of tamarind and lime juice. The sauce is enriched by hot chilli paste, basil leaves, tomatoes and shredded shallot which produce hot and fresh sensation concurrently. The delicacy is often enjoyed with steamed rice and other dishes. Gourami becomes favourite food of the Sumbawan due to its simplicity as well as its special and fresh taste.

2 Sambal Colo-Colo / Colo-colo Chilli Sauce

Sambal Colo-Colo adalah sambal pedas segar yang menjadi pelengkap hidangan utama di Bima. Dibuat dari cabai rawit, tomat, dan jeruk limau, sambal ini memiliki rasa asam, pedas, dan segar. Biasanya, sambal ini disajikan bersama ikan bakar, gorengan, atau makanan laut lainnya, menambah kenikmatan rasa.



Foto coklatkita.com

Colo-colo chilli sauce is a fresh hot chilli paste which compliments main dishes in Bima. Made of chilli padi, tomatoes, lime the chilli paste provides sour, hot and fresh sensation. Usually it is served with grilled fish, fried food, or other seafood as it improves the savoury taste.

3 Kue Kara Sumbawa / Sumbawa Kara Cake

Kue Kara Sumbawa merupakan camilan tradisional Bima yang terbuat dari tepung ketan, diisi parutan kelapa dan gula merah. Rasa manis dan gurihnya memberikan tekstur lembut yang khas. Kue ini sering disajikan dalam acara-acara keluarga dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya kuliner di wilayah Bima dan Sumbawa.



Foto UMKM Sumbawa.com

Sumbawa kara cake is a traditional snack of Bima which is made of sticky-rice flour, infilled by shredded coconut and brown sugar. The sweet and savoury taste is coupled by typical soft texture of the cake. The snack is often served in family gatherings and it is an inseparable part of culinary culture of Bima and Sumbawa area.

4 Sate Pokea / Pokea Satay

Sate Pokea adalah sate khas Bima yang menggunakan kerang segar sebagai bahan utama. Kerang ditusuk, dibakar hingga matang, dan disajikan dengan bumbu kacang gurih. Tekstur kerang yang kenyal berpadu sempurna dengan bumbu kacang, menjadikannya salah satu hidangan unik yang populer di kalangan masyarakat Bima dan pengunjung.



Foto Katadata.com

Pokea satay is a typical satay of Bima which uses fresh oyster as the main ingredient. The oyster is stuck and grilled well and is served with tasty peanut sauce. The chewy texture of the oyster perfectly blended with the peanut sauce has turned it into one of the most popular typical delicacies among the local of Bima and tourists.



PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengucapkan

Selamat Atas Pelantikan

Jenderal TNI (Purn) PRABOWO SUBIANTO

Sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Sebagai Wakil Presiden ke-14 Republik Indonesia

Serta Pelantikan

Para Menteri dan Wakil Menteri
Kabinet Merah Putih



MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

